

Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirto Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2023

Beatrix Regina Viat , Elly Lestary , Imam Hidayat
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi,
Universitas Tribuwana Tungadewi Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis system pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh BUMDes Tirto desa Landungsari, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BUMDes Tirto Desa Landungsari, dan Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penelolan keuangan BUMDes Tirto Desa Landungsari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa BUMDes Tirto telah mengimplementasikan aplikasi akuntansi untuk pencatatan keuangan serta otomatis,meski belum merata di semua unit usaha. Kendala utama yang dihadapi meliputi orientasi pada pemberdayaan masyarakat dibandingkan profitabilitas, Efisiensi sumber daya manusia, dan transisi ke sistem digital. BUMDes Tirto telah menunjukan transparansi melalui pelaporan kuangan yang rutin dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.Rekomendasi meliputi percepatan digitalisasai,pelatihan SDM,dan audit eksternal berkala nuntuk meningkatkan akurasi laporan keuangan.

Kata kunci : *Pengelolaan Keuangan BUMDes,Transparansi, Akuntabilitas, Digitalisasi, Efisiensi, Sumber Daya Manusia*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah pilar penting dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan lapangan pekerjaan. Seiring dengan perkembangan BUMDes, pengelolaan keuangan yang baik dan transparan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Pengelolaan keuangan yang efektif diharapkan mampu menciptakan efisiensi dalam penggunaan dana, meningkatkan kemandirian finansial desa, serta memaksimalkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, banyak BUMDes yang menghadapi tantangan serius terkait dengan pengelolaan keuangan, seperti ketidak jelasan dalam pembukuan,

kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola keuangan, serta rendahnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan yang baik. Masalah ini sering kali menghambat potensi BUMDes untuk berkembang dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat desa.

Untuk mengatasi masalah pengelolaan keuangan BUMDes, diperlukan pelatihan SDM, penggunaan teknologi pembukuan digital, transparansi melalui pelaporan rutin, penguatan regulasi, serta diversifikasi usaha. Langkah ini didukung pendampingan pemerintah dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan manfaat bagi desa. Salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Implementasi BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan dasar, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan yang menjadi pondasi utama keberlanjutan usaha. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Maria Ulfah (2022) yang mengidentifikasi bahwa 70% BUMDes di Indonesia masih menghadapi permasalahan serius dalam tata kelola keuangan. Permasalahan mendasar dalam pengelolaan keuangan BUMDes berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya manusia.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes masih menjadi tantangan besar. Menurut Hamid (2023) mengungkapkan bahwa mayoritas BUMDes belum memiliki mekanisme pelaporan keuangan yang sistematis dan berkala kepada pemangku kepentingan yang menunjukkan bahwa rendahnya transparansi dan akuntabilitas berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Pengelolaan keuangan adalah aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Menurut Irfani (2020) pengelolaan keuangan adalah aktifitas untuk mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Purba (2021) Pengelolaan keuangan melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas keuangan, termasuk pengadaan dana usaha. Pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah proses pengaturan keuangan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana atau aset yang dimiliki oleh Bumdes guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan tujuan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam mendukung kegiatan usaha desa.

TELAAH LITERATUR

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh desa serta masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes berfungsi sebagai instrumen desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berperan sebagai penggerak perekonomian desa yang mampu menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, serta menjadi wadah pemberdayaan masyarakat (Hidayat, 2019).

Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dalam konteks BUMDes, pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan dengan kelangsungan usaha dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah atau pengelola dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas berarti kewajiban pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dan pelaksanaan program secara terbuka kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh kegiatan serta hasilnya kepada pemberi amanah. Dalam pengelolaan keuangan BUMDes, kedua prinsip ini sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan dana serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Manajemen Keuangan BUMDes

Menurut Harahap (2011), manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam BUMDes, manajemen keuangan dilakukan dengan cara menyusun anggaran usaha, melaksanakan kegiatan usaha sesuai rencana, melakukan pencatatan transaksi keuangan, hingga membuat laporan pertanggungjawaban. Keberhasilan BUMDes dalam mengelola keuangannya akan berpengaruh pada keberlangsungan usaha, kesejahteraan masyarakat, serta kontribusi terhadap pendapatan desa.

Teori Stakeholder

Teori stakeholder menyatakan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) dalam organisasi tersebut (Freeman, 1984). Dalam konteks BUMDes, stakeholders meliputi pemerintah desa, pengurus BUMDes, masyarakat desa, dan pihak eksternal yang terlibat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BUMDes harus memperhatikan kepentingan semua pihak agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan usaha.

Tujuan Pengelolaan Keuangan BUMDes

Tujuan pengelolaan keuangan BUMDes adalah untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai perencanaan, meningkatkan pendapatan BUMDes, memperkuat perekonomian desa, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan usaha.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yang mendalam untuk memahami bagaimana

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengelola keuangan mereka. Menurut (Sugiyono, 2013 :147). penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan informasi yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang perencanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data Skunder. Menurut Sugiyono (2014:135) yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam hal ini Penelitian Observasi dan melakukan wawancara langsung kepada kepala kantor BUMDes. Menurut Sugiyono (2014:137) yang menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, tabel-tabel, diagram atau mengenai topik penelitian. Data ini merupakan data yang berhubungan secara langsung dengan penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio dan deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan usaha milik Desa (BUMDes) Tirta Desa Landungsari. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio Solvabilitas, Likuiditas dan Profitabilitas. Berikut adalah tabel hasil rekapitulasi Data Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Landungsari tahun 2023.

Tabel 1
Rekapitulasi Data Keuangan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Desa Landungsari

Keterangan	2023
Aktiva Lancar	1.002.005.262
Total Aktiva	1.627.671.466
Hutang Lancar	305.402.000
Total Hutang	1.622.516.348
Ekuitas	245.661.000
Laba bersih Setelah Pajak	134.546.188
Kas	72.070.262
Piutang	894.867.500
Penjualan	2.382.020.650

Sumber : Data diolah 2024

1. Rasio Likuiditas Tahun 2023

Analisis rasio likuiditas menggunakan Current ratio (rasio lancar). Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Perhitungan rasio lancar menggunakan rumus Kasmir (2014) sebagai berikut:

Tabel 2
Total Aktiva Lancar dan Total Hutang Lancar

Keterangan	2023
Total Aktiva Lancar	1.002.005.262
Total utang Lancar	305.402.000

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Standar kriteria *Current Ratio* yaitu:

- >100% = Sehat
- 80% - 100% = Cukup Sehat
- 60% - 79% = Kurang Sehat
- 40% - 59% = Tidak Sehat
- < 40% = Sangat Tidak Sehat

Perhitungan:

$$\text{Current Ratio} = \frac{1.002.005.262}{305.402.000} \times 100\%$$

$$\text{Current Ratio} = 3,28 \times 100\% = 328\%$$

Berdasarkan standar Likuiditas maka *Current Ratio* Tahun 2023 Sehat

2. Rasio Solvabilitas Tahun 2023

Analisis rasio solvabilitas menggunakan *Debt To Equity Ratio*, yang merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan modal. Dengan kata lain, seberapa besar modal perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan modal. Rasio yang biasa disebut dengan rasio hutang ini mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai *debt ratio* yang rendah sebab tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik. Kasmir (2014) menjelaskan rumus DER yaitu:

Tabel 3
Total Hutang dan Total Modal

Keterangan	2023
Total Hutang	1.622.516.348
Total Modal	245.661.000

$$\text{Debt to Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Standar kriteria *Current Ratio* yaitu:

- >100% = Sehat
- 80% - 100% = Cukup Sehat
- 60% - 79% = Kurang Sehat
- 40% - 59% = Tidak Sehat
- < 40% = Sangat Tidak Sehat

Perhitungan :

$$\text{Debt to Ratio} = \frac{1.622.516.348}{245.661.000} \times 100$$

$$\text{Debt to Ratio} = 6,6 \times 100\% \\ = 660\%$$

Berdasarkan Standar Solvabilitas maka *Debt To Equity Ratio* Tahun 2023 Sehat

3. Rasio Profittabilitas Tahun 2023

Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur perbandingan sisa hasil usaha dengan modal. Perhitungan rasio *Return on Equity* (ROE) menggunakan rumus Kasmir (2014) sebagai berikut.

Tabel 4. Laba Setelah Pajak dan Total Ekuitas

Keterangan	2023
Laba Setelah Pajak	134.546.188
Total Ekuitas	245.661.000

$$\text{Return of Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Standar kriteria CurrenRatio yaitu.

- >100% = Sehat
- 80% - 100% = Cukup Sehat
- 60% - 79% = Kurang Sehat
- 40% - 59% = Tidak Sehat
- < 40% = Sangat Tidak Sehat

Perhitungan :

$$\text{Return of Equity} = \frac{134.546.188}{82.918.829} \times 100\%$$

$$\text{Return of Equity} = 1,6226 \times 100\% \\ = 162\%$$

Berdasarkan Standar profittabilitas maka *Debt* Tahun 20 *Return on Equity* 2023 Sehat

Pembahasan

1. Sistem Pencatatan Keuangan BUMDes Tirto

Pencatatan keuangan melalui penerapan aplikasi akuntansi menjadi langkah strategis bagi BUMDes Tirto Yaitu, untuk meningkatkan Keefektifan dan ketetapan dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi akuntansi memungkinkan data keuangan dicatat secara otomatis dan menyesuaikan dengan laporan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Namun penerapan aplikasi ini belum mencakup semua unit usaha, yang masih bergantung pada pencatatan manual menggunakan Excel. Penggunaan sistem manual ini berpotensi menimbulkan risiko seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pelaporan, dan inefisiensi. Oleh karena itu, perlu ada percepatan dalam proses digitalisasi di seluruh unit usaha BUMDes Tirto. Selain itu, pelatihan untuk tim akuntansi dalam mengoperasikan aplikasi akuntansi secara optimal.

2. Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan

Fokus utama BUMDes Tirto yang lebih menekankan pada dampak sosial dan pemberdayaan masyarakat dibandingkan profitabilitas menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan. Banyak unit usaha BUMDes Tirto yang tidak menghasilkan keuntungan besar, sehingga keberadaan operasional memerlukan strategi khusus, seperti diversifikasi pendapatan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal kapasitas dan produktivitas menjadi tantangan lain yang perlu diatasi. Pengelolaan yang efektif membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya termotivasi, tetapi juga memiliki keterampilan yang mumpuni untuk mengelola keuangan secara profesional, terutama di era digital.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem pengelolaan keuangan BUMDes Tirto telah mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Laporan keuangan rutin yang disusun setiap bulan dan tahun dipublikasikan secara terbuka di balai desa. Rencananya untuk menerbitkan laporan keuangan secara online melalui website akan lebih meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. Prinsip transparansi ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga sebagai alat evaluasi bagi manajemen BUMDes.

Dengan laporan yang mudah diakses, masyarakat dapat menyatukan penggunaan dana, pendapatan, dan pengeluaran secara langsung.

4. Keselarasan dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan

BUMDes Tirto telah berupaya untuk memenuhi prinsip pengelolaan keuangan yang baik, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penggunaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan menunjukkan bahwa BUMDes Tirto telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, untuk menjamin keselarasan lebih lanjut, diperlukan audit eksternal secara berkala untuk memperoleh akurasi dan kinerja laporan keuangan. Langkah ini akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

5. Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Keuangan

Rencana jangka panjang BUMDes Tirto Yaitu untuk mengintegrasikan semua unit usaha ke dalam sistem berbasis aplikasi adalah langkah yang inovatif. Rencana ini mencakup pengembangan informasi teknologi, seperti penggunaan situs web untuk publikasi laporan keuangan. Selain itu, integrasi teknologi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, meminimalkan risiko kesalahan manual, dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik. Strategi jangka panjang ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan evaluasi berkala terhadap penerapan teknologi. Hal ini penting agar teknologi yang digunakan benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan BUMDesnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diatas yang telah dilakukan maka penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Tirto Desa Landungsari telah mengalami perkembangan yang positif dalam sistem pengelolaan keuangannya, terutama dengan penerapan aplikasi akuntansi sejak tahun 2023. Sistem pencatatan keuangan yang sudah terstruktur dan menggunakan teknologi ini telah membantu memperbaiki validitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. meskipun terdapat tantangan yang masih harus dihadapi, seperti ketidakefektifan penggunaan aplikasi di semua unit usaha, BUMDes serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan profitabilitas. BUMDes Tirto juga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mempublikasikan laporan keuangan. BUMDes memiliki rencana jangka panjang.

Masih terdapat kelemahan dan kekurangan salah satu kelemahan utama yaitu belum meratanya penggunaan sistem digital di seluruh unit usaha, sehingga masih ada unit yang bergantung pada pencatatan manual menggunakan Excel. Selain itu, transisi ke sistem digital menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi secara optimal, yang dapat menghambat efektivitas pencatatan dan pelaporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dengan baik melalui publikasi laporan keuangan secara rutin, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih terbatas pada publikasi di balai desa dan belum tersedia secara online untuk akses yang lebih luas. Selain itu, meskipun laporan keuangan telah mengikuti standar PSAK, belum adanya audit eksternal secara berkala dapat menjadi kelemahan dalam menjamin akurasi dan kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem audit dan transparansi perlu menjadi perhatian utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes Tirto.

SARAN

1. Peningkatan Penggunaan Aplikasi Akuntansi di Semua Unit Usaha BUMDes Tirto Untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, BUMDes Tirto Desa Landungsari harus memperluas penerapan akuntansi ke seluruh unit usaha yang masih menggunakan sistem manual, seperti Excel. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan manusia dan meningkatkan integrasi data keuangan. Dengan penggunaan aplikasi yang terintegrasi, seluruh data akan dicatat secara otomatis dan terhubung langsung dengan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam laporan dan meningkatkan akurasi informasi yang tersedia.
2. Pelatihan dan Pengembangan SDM BUMDes Tirto harus memberikan pelatihan yang memadai kepada seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, agar mereka dapat mengoperasikan aplikasi akuntansi dengan efisien dan memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan keterampilan staf teknis dalam penggunaan perangkat lunak akuntansi, tetapi juga akan membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang akurat dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Nur dkk . "Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu." *Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia* 2.1 (2023): 8-28.
- Irfani, Agus S. *Manajemen Keuangan dan Bisnis; Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Kasmir, D., & SE, M. M. (2017). *Analisis Laporan Keuangan (Revisi)*. Jakarta : PT RajagrafindoPersada, JAKARTA
- Maria ulfah,Hidayah, N. dkk (2022). Pengelolaan Dana Desa.
- Purba, Sahala,dkk. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Famohouni di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara." *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis* 6.2 (2021): 188-194.
- Sugiyono.(2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualiatatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta." *Jurnal Civitas Academica Universitas Esa Unggul* 1: 1.
- Sugiyono (2014). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Bandung Alfabeta, CV.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.